

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA, SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL, DAN *WHISTEBLOWING SYSTEM* TERHADAP
PENCEGAHAN KECURANGAN PADA PENGELOLAAN
DANA DESA
(Studi Empiris Pada Desa-Desa Di Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat)**

SKRIPSI



**Nama: Klara Agustina
NIM : 222018222**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2022**

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA, SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL, DAN *WHISTEBLOWING SYSTSEM* TERHADAP
PENCEGAHAN KECURANGAN PADA PENGELOLAAN
DANA DESA
(Studi Empiris Pada Desa-Desa Di Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akutansi**



**Nama: Klara Agustina
NIM : 222018222**

**UNIVERSITAS MUHAMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2022**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Klara Agustina
NIM : 222018222
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Pemeriksaan Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa-Desa Di Kecamatan Pajar Bulan)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarja Strata Satu di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Palembang, September 2022



Klara Agustina

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang
Palembang

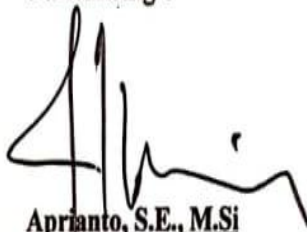
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa-Desa Di Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat)

Nama : Klara Agustina
NIM : 222018222
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Pemeriksaan Akuntansi

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal September 2022

Pembimbing 1



Aprianto, S.E., M.Si
NIDN/NBM: 0216087201/859190

Pembimbing 2



Darmayanti, S.E., Ak. M.M., CA
NIDN/NBM: 0219057901/1187172

Mengetahui

Dekan

u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Betti, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

*“rencanaku bisa saja jadi wacana, tetapi rencana allah sudah pasti luar biasa.
“Jika kamu terburu-buru untuk sampai kedepan maka kamu akan melewatkan hal-hal
penting ”*

(Klara Agustina)

Terucap Syukur kepada Allah SWT

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- ❖ Kedua Dosen Pembimbing*
- ❖ Kedua Orang Tuaku yang tersayang dan tercinta yang tak henti-hentinya mendoakanku, mensupportku dan memotivasiku*
- ❖ kakak-kakaku*
- ❖ Keluarga Besarku*
- ❖ Sahabat-Sahabatku*
- ❖ Almamater*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Robbil'alamin, tiada kata yang dapat penulis sampaikan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan ridho-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa-Desa Di Kecamatan Pajar Bulan)”**. Skripsi ini disusun sebagai syarat menyelesaikan jenjang strata I (satu) guna meraih gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis, bab metode penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan dan saran. Meski dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki, tetapi penulis yakin tanpa adanya saran bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak mungkin dapat tersusun sebagaimana mestinya.

Ucapan terima kasih penulis juga sampaikan terutama kepada orang tua bapak saya bapak Sudar Madi dan ibu saya ibu Elma serta keluarga yang telah mendoakan dan memberi semangat dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada bapak Aprianto, S.E., M.Si. dan ibu Darmayanti. S.E.,Ak.,M.,M.CA yang telah membimbing dan memberikan pengarahan penyelesaian skripsi ini. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Yudha Mahrom, S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri, S.E.,Ak.,M.Si.CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Pengajar Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Kantor Kepala Desa Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat yang telah memberikan izin penelitian sehingga selesainya penelitian skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas setiap bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini, untuk saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, September 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK (Bahasa Indonesia)	xv
ABSTRACT (Bahasa Inggris)	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II : KAJIAN PUSTAKAAN, KERNAGKA PEMIKIRAN DAN	
HIPOTESIS	14
A. Landasan Terori	14
1. Teori Stewardship	14
2. Kompetensi Aparatur Desa.....	15
a. Definisi Aparatur Desa	15
b. Indikator Kompetensi Aparatur Desa.....	18
3. Sistem Pengendalian Internal	19
a. Definisi Pengendalian Internal	19
b. Indikator Pengendalian Internal	20
4. <i>Whistleblowing System</i>	21
a. Definisi <i>Whistleblowing System</i>	21
b. Indikator <i>Whistleblowing System</i>	23
5. Kecurangan (<i>Fraud</i>)	24

a.	Definisi Kecurangan (<i>Fraud</i>)	24
b.	Indikator Kecurangan (<i>Fraud</i>)	25
B.	Penelitian Sebelumnya	26
C.	Kerangka Pemikiran	31
1.	Pengaruh Kopetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Kecurangan.....	31
2.	Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan.....	32
3.	Pengaruh <i>Whistleblowing System</i> Terhadap Pencegahan Kecurangan.....	33
4.	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan <i>Whistleblowing System</i> Terhadap Pencegahan Kecurangan.....	34
D.	Hipotesis	35
BAB III : METODE PENELITIAN.....		37
A.	Jenis Penelitian	37
B.	Lokasi Penelitian	38
C.	Operasionalisasi Variabel.....	38
D.	Populasi dan Sampel.....	39
1.	Populasi	39
2.	Sampel	40
E.	Data yang Di Perlukan.....	40
F.	Metode Pengumpulan Data	41
1.	Tes	41
2.	Wawancara	42
3.	Observasi	42
4.	Kuesioner atau Angket	42
5.	Survey.....	42
6.	Analisis Dokumen	42
G.	Analisis Data dan Teknik Analisis	43
1.	Analisis Data	44
2.	Teknik Analisis.....	44

a.	Uji Validasi.....	44
b.	Uji Realibilitas.....	45
c.	Uji Deskriptif.....	45
d.	Uji Asumsi Klasik	45
e.	Uji Hipotesis	47
1.	Analisis Regresi Linier Berganda.....	47
2.	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	47
3.	Uji Hipotesis Secara Bersama (Uji F)	48
4.	Pengujian Hipotesis Secara Parsial	49
BAB IV :	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A.	Hasil Penelitian.....	51
1.	Gambaran Singkat Kantor-Kantor Kepala Desa di Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat	51
2.	Gambaran Profil Responden.....	52
3.	Pengujian Data.....	53
a.	Uji Validitas	54
b.	Uji Reliabilitas.....	57
4.	Statistik Deskriptif	59
5.	Uji Asumsi Klasik	75
a.	Uji Normalitas	75
b.	Uji Multikolinieritas	76
c.	Uji Heteroskedestisitas	77
6.	Uji Hipotesis	78
a.	Uji Regresi Linier Berganda.....	78
b.	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	80
c.	Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji T)	81
d.	Uji Hipotesis Secara Bersama (Uji F)	83
B.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	84
1.	Hasil Uji Pengaruh Kopetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Kecurangan.....	84
2.	Hasil Uji Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahaan Kecurangan.....	86

3. Hasil Uji Pengaruh <i>Whistleblowing System</i> Terhadap Pencegahan Kecurangan.....	88
4. Hasil Uji Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan <i>Whistleblowing System</i> Terhadap Pencegahan Kecurangan.....	89
BAB V : SIMPULAN DAN SARAN	91
A. Simpulan.....	91
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Survei Pendahuluan	9
Tabel II.1	Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya.....	29
Tabel III.1	Daftar Kantor Kepala Desa Di Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat.....	38
Tabel III.2	Operasional Variabel	38
Tabel III.3	Jumlah Responden Aparatur Desa.....	40
Tabel IV.1	Jumlah Responden Aparatur Desa.....	52
Tabel IV.2	Gambaran Profil Responden.....	52
Tabel IV.3	Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi Aparatur Desa.....	54
Tabel IV.4	Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Internal	55
Tabel IV.5	Hasil Uji Validitas Variabel <i>Whistleblowing System</i>	56
Tabel IV.6	Hasil Uji Validitas Variabel Pencegahan Kecurangan.....	57
Tabel IV.7	Hasil Uji Realibilitas	58
Tabel IV.8	Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel	59
Tabel IV.9	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Pengetahuan.....	61
Tabel IV.10	Rekapitulasi Jawaban Responden Indikator Kemampuan	62
Tabel IV.11	Rekapitulasi Jawaban Responden Indikator Sikap.....	63
Tabel IV.12	Rekapitulasi Jawaban Responden Indikator Lingkungan Pengendalian.....	64
Tabel IV.13	Rekapitulasi Jawaban Responden Indikator Penilaian Resiko....	65
Tabel IV.14	Rekapitulasi Jawaban Responden Indikator Prosedur Pengendalian.....	66
Tabel IV.15	Rekapitulasi Jawaban Responden Indikator Pemantauan	67
Tabel IV.16	Rekapitulasi Jawaban Responden Indikator Informasi dan Komunikasi.....	68
Tabel IV.17	Rekapitulasi Jawaban Responden Indikator Anonimitas	69
Tabel IV.18	Rekapitulasi Jawaban Responden Indikator Idependensi.....	70
Tabel IV.19	Rekapitulasi Jawaban Responden Indikator Akses Yang Mudah.....	70
Tabel IV.20	Rekapitulasi Jawaban Responden Indikator Tindak	

	Lanjur	71
Tabel IV.21	Rekapitulasi Jawaban Responden Indikator Manipulasi	72
Tabel IV.22	Rekapitulasi Jawaban Responden Indikator Respresentasi	73
Tabel IV.23	Rekapitulasi Jawaban Responden Indikator Salah Penerapan Secara Sengaja.....	74
Tabel IV.24	Hasil Uji Normalitas	76
Tabel IV.25	Hasil Uji Multikolinieritas	77
Tabel IV.26	Hasil Uji Regresi Linier Berganda	79
Tabel IV.27	Koefisien Determinasi	81
Tabel IV.28	Hasil Uji T	81
Tabel IV.29	Hasil Uji F	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Pemikiran	31
Gambar IV.1	Hasil Uji Normalitas Grafik P.P Plot.....	75
Gambar IV.2	Hasil Uji Heteroskedestisitas Scatter Plot	78

ABSTRAK

Klara Agustina/ 222018222/ 2022/ Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa-Desa di Kecamatan Pajar Bulan).

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah yang ada yaitu bagaimana pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal dan whistleblowing system terhadap pencegahan kecurangan pada Desa-Desa di Kecamatan Pajar Bulan. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, dan whistleblowing sistem terhadap pencegahan kecurangan pada Desa-Desa di Kecamatan Pajar Bulan secara parsial dan simultan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiasi. Tempat penelitian dilakukan Kantor Kepala Desa di Kecamatan Pajar Bulan. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, koefisien determinasi, analisis regresi linier berganda, uji t dan uji f dibantu oleh Sttistic Program For Spesial Science (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur Desa tidak berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan pada Kantor Kepala Desa Kecamatan Pajar Bulan. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh Terhadap Pencegahan Kecurangan pada kantor Kepala Desa Kecamatan Pajar Bulan. Whistleblowing System tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada kantor Kepala Desa Kecamatan Pajar Bulan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, dan whistleblowing system memiliki pengaruh secara simultan terhadap pencegahan kecurangan pada kantor Kepala Desa Kecamatan Pajar Bulan .

Kata Kunci : Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System, Pencegahan Kecurangan.

ABSTRACT

Klara Agustina/ 222018222/2022/ Influence of Competence of Village Apparatus, Internal Control System, Whistleblowing System on Prevention of Fraud in Village Fund Management (Empirical Study on Villages in Pajar Bulan District).

This study was conducted to answer the existing problems, namely how the influence of village apparatus competence, internal control system and whistleblowing system on fraud prevention in villages in Pajar Bulan District. The aim is to determine the effect of village apparatus competence, internal control system, and whistleblowing system on fraud prevention in villages in Pajar Bulan District partially and simultaneously. The type of research used is associative research. The place of research was carried out by the Village Office in Pajar Bulan District. The data used are primary and secondary data. Data collection methods used in this study were interviews and questionnaires. The data analysis technique used in this study is the classical assumption test, coefficient of determination, multiple linear regression analysis, t test and f test assisted by the Sttistic Program For Special Science (SPSS). The results showed that the Village Apparatus Competence had no effect on the Prevention of Fraud at the Village Head's Office, Pajar Bulan District. The Internal Control System has an effect on the prevention of fraud at the office of the Village Head of Pajar Bulan District. The Whistleblowing System has no effect on preventing fraud at the Pajar Bulan District Village Head office. This study also shows that the competence of village officials, internal control systems, and whistleblowing systems have a simultaneous influence on fraud prevention at the Pajar Bulan District Village Head office.

Keywords: Village Apparatus Competence, Internal Control System, Whistleblowing System, Fraud Prevention.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat (buku saku dana desa 2017:2). dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta salah satu upaya negara untuk memajukan perekonomian masyarakatnya maka pemerintah memberikan alokasi dana desa sebagai wujud upayah pemerintah untuk meningkatkan anggaran pembangunan desa, pelayanan, serta pemberdayaan masyarakat melalui dana desa.

Dana desa diartikan sebagai anggaran dana yang dikucurkan oleh pemerintah kepada desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016. dana yang di peruntukan untuk desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Setiap desa harus dapat mengelola dana desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman pengelolaan keuangan desa, di harapkan dapat

menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena di dalamnya mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan serta pertanggung jawaban di samping itu permandengri no 113 tahun 2014 ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa di lakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Menurut ACFE 2012 *Fraud* adalah suatu tindakan yang sengaja dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk menggunakan sumber daya dari suatu organisasi secara tidak wajar (tindakan melawan hukum) dan salah menyajikan fakta (menyembunyikan fakta) untuk memperoleh keuntungan pribadi (klara at al.,2018). fraud adalah tindakan melawan hukum yang di lakukan seseorang untuk menguntungkan dirinya sendiri tanpa peduli pada pihak yang di rugikan, penyebab terjadinya fraud dapat disebarkan oleh adanya kesempatan yang terbuka lebar, hal ini tidak hanya dilakukan seseorang namun juga dapat di lakukan organisasi baik kecil maupun besar dengan maksud mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada keuntungan yang sebenarnya di dapatkan.

Pencegahan kecurangan (*fraud*) adalah tindakan yang dapat dilakukan untuk menghindari orang untuk berbohong, menjiplak, mencuri, memeras, memanipulasi, kolusi dan menipu orang lain dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang/kelompok lain dengan cara melawan hukum (romandianti at, al 2020)

Pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa sangat di pengaruhi oleh kompetensi aparatur desa, untuk menjadi pemimpin di masyarakat seseorang harusla memiliki kompetensi sebagai aparatur seperti yang diatur dalam

peraturan kementerian dalam negeri nomor 108 tahun 2017. Dengan adanya kompetensi aparatur yang memadai dalam pengelolaan keuangan desa, maka sangat diharapkan tujuan ekonomi dan sosial pemerintahan desa dapat tercapai.

Oleh karena itu peran serta pihak-pihak di luar pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seperti tokoh desa, tokoh agama, kaum petani, pengusaha desa, serta perwakilan masyarakat lainnya harus bersinergi dan dilibatkan dalam pengelolaan dana desa. kompetensi menjadi komponen terpenting dalam menjalankan tugas karena keberhasilan untuk menjalankan tugas-tugas di bebaskan kepadanya. cakupan kemampuan yang harus dimiliki oleh aparatur desa adalah kemampuan, keterampilan dan ketegasan yang tentunya hal tersebut dapat di peroleh dari pendidikan, pelatihan serta pengalaman. (kadek at al, 2017)

Terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa juga dapat dicegah dengan cara mengoptimalkan sistem pengendalian internal yang baik dengan memperbaiki kualitas pengendalian internalnya. Sistem Pengendalian Internal (SPI) sebagai salah satu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta mempunyai peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud) secara dini (Pratama, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Laksmi dan Sujana (2019), menurut PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP mengenai sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang di lakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien keandalan pelaporan

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hal lain yang juga dapat mempengaruhi kecurangan adalah *Whistleblowing* adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. penerapan *whistleblowing system* dengan baik oleh pegawai di perlukan dalam pencegahan kecurangan. menurut (alfian et al 2018) system ini adalah wadah bagi whistleblower untuk mengungkap dan melaporkan tindak kecurangan selain itu, penelitian naomi 2015 menunjukkan bahwa terjadinya penurunan jumlah kecurangan setelah di lakukanya *whistleblowing system*.

Penelitian yang di lakukan oleh Wahyuni & Nova (2019), Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. berbeda dengan penelitian yang di lakukan oleh oleh Anisykurillah dan Wardianti (2018) yang menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan akuntansi.

Penelitian yang di lakukan hermiyati (2008) nisak dkk (2013), dan purwita sari (2013) menyatakan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh usman et al (2015), wonar et al.,(2018) menyatakan bahwa audit internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan purnawati (2018), pamungkas et, al (2017) dan romadiani dkk (2020) mengatakan bahwa *whisteblowing*

berpengaruh positif pada pendeteksi fraud dan pencegahan kecurangan, penelitian yang dilakukan penelitian yang dilakukan Wijaya dkk. (2017), sujana et al (2020) menemukan bahwa *whistleblowing* berpengaruh negatif pada kecurangan akuntansi dan menemukan bahwa *whistleblowing* tidak mempengaruhi pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan desa.

Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia yang diungkapkan oleh Indonesian Corruptin Watch (ICW) telah mengawasi korupsi yang terjadi di desa pada tahun 2015 terjadi 17 kasus dan di tahun 2016 terjadi 48 kasus dan meningkat tajam pada tahun 2017 terjadi 98 kasus, pada tahun 2018 terjadi 104 kasus. ICW mencatat pada tahun 2015 ada 15 kepala desa yang melakukan korupsi 2016 ada 61 kepala desa yang melakukan korupsi dan pada tahun 2017 meningkat kembali menjadi 66 kepala desa, pada tahun 2018 sebesar 89 kepala desa. Korupsi dana desa setiap tahun mengalami peningkatan. Rata-rata setiap tahun terjadi 61 kasus korupsi sektor desa, yang dilakukan oleh 52 kepala desa dan merugikan keuangan negara mencapai Rp. 256 Miliar. (Alamsyah et al., 018; CNN Indonesia, 2019; ICW, 2018).

Penyebab yang terjadi diantaranya pengelembungan anggaran, kegiatan proyek fiktif, laporan fiktif, pengelapan, penyalah penggunaan anggaran Sepanjang 2015- 2017 ditemukan ada 14 kasus korupsi dana desa dengan modus mark up Sepanjang 2015-2017, ditemukan ada 15 kasus kegiatan/proyek fiktif yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Selama tahun 2015- 2017 terdapat 17 kasus laporan fiktif sebagai modus korupsi dana desa. Perlu diketahui selama 2015-2017 terdapat 32 kasus korupsi dana desa dengan modus pengelapan. Selama periode 2015-2017 terdapat 51 kasus penyalahgunaan anggaran (Indonesian

Corruption Watch, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa dengan bertambahnya kasus korupsi setiap tahunnya ini menunjukkan belum adanya sistem yang secara komprehensif dilakukan atau dibuat oleh Pemerintah dalam hal pengawasan dana desa.

Kasus ini terjadi di desa Sodong Kabupaten Pandeglang, Kabid Humas Polda Banten AKBP Shinto Silitongan mengatakan, kasus itu berawal pada 22 April 2020 saat SJ melakukan korupsi dana desa sebesar Rp418.134.664,43 dana desa APBD tahun anggaran 2019 yang turun sebesar Rp.772.834.000 yang di peruntukan untuk pembangunan desa namun hanya sebesar 354.413.135. Saja yang terealisasi dan sisanya masuk ke kantong pribadi kades, Shinto menyebut, uang milik negara untuk pembangunan desa tersebut ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi. Uang dari hasil korupsi sebesar Rp418.134.664,43, pelaku mengatakan digunakan untuk keperluan di desa dan bukan di peruntukannya dan untuk kepentingan pribadi tersangka.

Kepala desa di desa sodong yang menyandang gelar sebagai tersangka berdalih bahwa gaji sebagai kepala desa yang hanya 2.500.000 perbulan yang belum tentu di dapatkan setiap bulan tidak dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarga. sehingga temuan proyek pembangunan fasilitas di manfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Akibat perbuatan tersangka, ia dikenakan hukuman sesuai dalam Atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 Jo pasal 18 UURI No. 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UURI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UURI No. 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan ancaman pidana maksimal selama 20 tahu penjara, kasus yang

terjadi desa sodong ini di lakukan dengan cara melakukan pembangunan fisik tidak sesuai dengan spesifikasinya, Hal ini sesuai dengan keterangan ahli audit bangunan dari akademisi. Selain itu, ada juga penyalahgunaan anggaran negara lainnya. (Merdeka.com)

Kasus yang terjadi di Palembang provinsi Sumatera Selatan kasus yang menjerat Askari kepala desa kabupaten Musi Rawas, dana yang diperuntukan untuk bantuan covid sebesar 187,200.000, yang seharusnya di bagikan kepada warga yang terkena dampak malah di gunakan untuk berfoya-foya, dirincikan uang sebanyak 70.000.000 di gunakan untuk bermain togel. 30.000.000 di gunakan untuk bermain remi, serta 20.000.000 di bayarkan dp mobil selingkuhan pak hakim, modus yang digunakan dana tersebut seharusnya di berikan pada 156 warga namun uang tersebut hanya satu kali di bagikan sebesar masing-masing 600.000. Sebelumnya, jaksa Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau Sumar Heti mendakwa Askari dengan pasal berlapis, yakni Pasal 2 ayat 2 jo Pasal 18 ayat 3 atau Pasal 3 jo Pasal 18 dan Pasal 8 Undang-Undang Tipikor. setelah persidanganya atas perbuatanya tersebut askari terancam sanksi hukuman pidana seumur hidup. (Kompas.com)

Kasus korupsi yang terjadi pada Fajar sidik rangkupi kepala desa pasar bataan, kabupaten Mandailing Natal di tetapkan menjadi tersangka atas pengelapan dana senilai Rp 413.220.000 yang di peruntukan bagi pembangunan TPA (taman pendidikan Al-qur'an). Pada tahun 2016 Desa Pasar Bataan menerima dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Madina Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp78.000.000 dan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN TA 2016 sebesar Rp604.381.985. telah

dilakukan realisasi penyerapan anggaran sebanyak 4 kali sesuai dengan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yaitu sebesar Rp682.381.958.

Pada pelaksanaan APBDes diketahui ada kegiatan fisik yang belum selesai dikerjakan namun telah dilakukan penyerapan anggaran yaitu pembangunan Gedung TPA (Taman Pendidikan Alquran) dan bangunan pelengkap yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp413.210.800. MP Nainggolan menambahkan tersangka dijerat dengan Pasal 2 Subs Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancamannya maksimal penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. (merdeka.com)

Pajar Bulan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Lahat, Sumatra Selatan, Indonesia. Merupakan pemekaran dari Kecamatan Jarai berdasarkan peraturan daerah No. 14 tahun 2000, kecamatan Pajar Bulan memiliki 20 desa yaitu diantaranya Aceh, Bantunan, Benua Raja, Gelung Sakti, Jentik'an, Kota Raya Darat, Kota Raya Lembak, Pajar Bulan, Pajar Tinggi, Pulau, Pulau Panggung, Sukabumi, Sumur, Talang Baru, Talang Mengkenang, Talang Padang Tinggi, Talang Pagar Agung, Talang Tangsi, Tongkok, Ulak Bandung. (pada setiap desa telah memiliki satu kantor kepala desa lengkap dengan perangkatnya, berdasarkan data diatas peneliti melakukan survei pendahuluan pada tiga desa di kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat sebagai berikut ini.

Tabel I.1
Survei Pendahuluan

Kantor kepala desa di kecamatan pajar bulan kabupaten lahat	Hasil survei pendahuluan
Kantor kepala desa kota raya darat di kecamatan pajar bulan kabupaten lahat. (wawancara pada kepala desa)	Berdasarkan hasil survei yang di lakukan pada desa kota raya darat bahwa pengendalian internal belum cukup baik seperti para pegawai yang bekerja tidak pada kompetensi yang dimiliki serta kurangnya pengawasan yang di lakukan oleh kepala desa kepada para pegawai. Untuk kompetensi yang dimiliki para pegawai didapati pegawai yang tidak lulus sma sehingga kemampuan yang dimiliki terbatas. untuk pelaporan keuangan terkadang tidak di laporkan tepat waktu karena sering terjadinya penginputan yang lama.
Kantor kepala desa pajar bulan di kecamatan pajar bulan kabupaten lahat. (wawancara pada kepala desa)	Hasil survei yang di lakukan di kantor kepala desa pajar bulan ditemukan bahwa di desa pajar bulan telah menerapkan <i>whistleblowing system</i> dapat dilihat pada adanya baliho yang menunjukkan laporan realisasi anggaran dari pemerintah yang dapat di lihat oleh warga secara langsung hal ini dapat menimalisir terjadinya kecurangan, untuk pengendalian internal belum maksimal karena masih kurangnya pengawasan yang di lakukan aparatur pada pegawai sehingga kurangnya komunikasi, untuk kompetensi aparatur, pendidikan lebih di tekankan dari pada kemampuan sehingga terjadi tidak sesuai nya posisi yang di kerjakan dengan kemampuan yang dimiliki sehingga menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penginputan data. untuk pelaporan keuangan di lakukan tepat waktu dan memenuhi skalaritas yang telah di tentukan.

Kantor kepala desa bantunan kecamatan pajar bulan kabupaten lahat. (Wawancara pada kepala desa)	Hasil survei yang dilakukan pada kantor kepala desa bantunan di dapati pengendalian internal belum maksimal karena aparatur hanya terfokus melakukan pengawasan pada pelaporan keuangan sehingga kurangnya pengawasan yang dilakukan untuk para pegawai, untuk kompetensi aparatur daerah belum maksimal karena masih terdapatnya pegawai yang tidak lulus sma hal ini dapat menyebabkan kurangnya kemampuan pegawai pada teknologi yang semakin maju untuk <i>whistleblowing system</i> sudah cukup memadai dengan adanya spanduk-spanduk yang menunjukkan kegiatan pembangunan serta baliho perealisasi dana desa.
---	--

Sumber : Penulis 2022

Berdasarkan hasil survei pendahuluan yang dilakukan pada tiga kantor kepala desa pada kecamatan pajar bulan kabupaten lahat menunjukkan bahwa pengendalian internal pada kantor kepala desa belum maksimal seperti kurangnya pengawasan yang dilakukan pada pegawai serta tidak sesuai dengan posisi karyawan dengan kompetensi yang dimiliki dan masih ada karyawan yang merupakan tamatan SMA sehingga sering terjadi kendala pada saat pengaplikasian komputer. Berdasarkan hal tersebut artinya terdapat indikator yang bermasalah yaitu kompetensi karyawan yang perlu ditingkatkan guna menciptakan pekerja yang kompeten.

Hal ini lah yang mengharuskan aparatur desa dari kepala desa hingga para staff dapat memberikan pelayanan yang baik, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses keperluan dikantor kepala desa serta memudahkan masyarakat mendapat informasi tentang pengalokasian dana desa. berdasarkan

survei yang di lakukan pada desa kecamatan pajar bulan kabupaten lahat belum maksimal, dan belum sesuai dengan yang seharusnya berlaku.

Berdasarkan pada uraian diatas maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Pengelolaan Dana Desa** “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis menuliskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, dan *whistleblowing system*, terhadap pencegahan kecurangan?
2. Bagaimana pengaruh kompetensi aparatur desa, terhadap pencegahan kecurangan?
3. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal, terhadap pencegahan kecurangan?
4. Bagaimana pengaruh *whistleblowing system* terhadap, pencegahan kecurangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem

pengendalian internal, dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan.

2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa, terhadap pencegahan kecurangan.
3. untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan.
4. untuk mengetahui pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan.

D. Manfaat Penelitian

penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi pihak-pihak sebagai berikut.

1. Bagi Penulis

penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan yang lebih serta meningkatkan pengetahuan mengenai kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan pada pemerintahan desa dengan gaya kepemimpinan sebagai variabel moderasi.

2. Bagi Aparatur Desa

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi aparatur desa mengenai pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan pada pemerintahan desa dengan gaya kepemimpinan sebagai variabel moderasi.

3. Bagi Almamater

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi serta dapat menjadi referensi untuk mmenjadi bahan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Betri. 2018. "*Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif Edisi 1*". Palembang : NoerFikri Offset.
- Indriasih, Dewi. 2020. "*Whistleblowing Wujudkan Tata Kelola Perusahaan Lebih Baik*". Bandung : CV. Cendekia Press.
- Islamiyah, Faridatul. "*Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak (Studi Empiris Pada Desa Sukoanyar, Desa Wajak, Desa Sukolilo, Desa Blayu, dan Desa Patokpicias)*". **Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA) Volume 8, No. 1** e-ISSN : 2715 – 7016.
- Klara, Syaikhul, & Bill. 2018. "*Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Moral Sensitivity Sebagai Variabel Moderasi*". **Jurnal Akuntansi, Audit, & Aset** Volume 1, Nomor 2 63-89.
- Kumaat, Valery G. 2011. "*Internal Audit*". Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Kuntadi, Cris. 2017. "*SIKENCUR (Sistem Kendali Kecurangan) Menata Birokrasi Bebas Korupsi*". Jakarta : PT. Gramedia.
- Muliati, Yuniasih, & Deddy. "*Pengaruh Whistleblowing dan Penerapan Hukum Karma Phala Pada Pencegahan Kecurangan Di LPD Se-Kota Denpasar*". **JUARA (Jurnal Riset Akuntansi) Prodi Akuntansi FEB UNMAS Denpasar** ISSN 2088 – 3382, E-ISSN 2443 – 0641.
- Onita, dkk. 2020. "*Manajemen Kinerja Dalam Organisasi*". Medan : Yayasan Kita Menulis.
- Romadaniati, Taufik, & Nasir. "*Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Interna, dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pemerintahan Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Desa-Desa Di Kabupaten Bengkalis)*". Bilancia: **Jurnal Ilmiah Akuntansi** Vol. 4, No. 3 e-ISSN 2685 – 5607.
- Sujarweni. V Wiratna. 2015. "*Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*". Yogyakarta : Penerbit Pustaka Baru Press.

Sujarweni. V Wiratna. 2021. "*Metodelogi Penelitian*". Yogyakarta : PUSTAKABARUPRESS.

Sujarweni. V Wiratna. 2019. "*Metodelogi Penelitian – Bisnis & Ekonomi*". Yogyakarta : PUSTAKABARUPRESS.

Widiyarta, Trisna, & Tungga. 2017. "*Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Buleleng)*". **e-Journal S1** Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 8 No: 2).